

Komisi Pengungkap Kebenaran Mendesak Dibentuk

“Kami mau buka ini semua. Kalau salah, akan dihukum.”

Eko Ari Wibowo

ari@tempo.co.id

JAKARTA — Keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia dan lembaga pegiat HAM, Setara Institute, mendatangi Dewan Pertimbangan Presiden, kemarin. Mereka meminta Wantimpres menyampaikan aspirasi agar pemerintah mengungkap semua kasus pelanggaran HAM berat. Sedangkan pemerintah menawarkan penyelesaian secara non-yudisial atau rekonsiliasi. “Rekonsiliasi adalah *output* dari kasus, tetap harus diungkap,” kata Ketua Badan Pengurus

Setara Institute, Hendardi, kemarin.

Pengungkapan kasus ini, kata dia, membutuhkan komisi *ad hoc* karena Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Setara mengusulkan pembentukan Komisi Pengungkapan Kebenaran dan Pemulihan Korban, yang sifatnya bukan lembaga pemberi rekomendasi kepada Presiden tapi keputusannya mengikat.

Tugas utama komisi itu mengungkap kebenaran, lalu menentukan langkah lanjut apakah sebuah kasus bisa direkonsiliasikan atau diselesaikan



Hendardi.

melalui mekanisme pengadilan. Mereka juga menelusuri dan mengidentifikasi daftar nama pelaku dan korban dalam pelanggaran HAM masa lalu. “Karena itu, komisi ini harus diberi

mandat yang jelas dan kuat, bukan binatu baru yang bertugas mencuci kejahatan masa lalu,” kata Hendardi.

Dalam kesempatan itu, Setara mendampingi keluarga korban pelanggaran HAM, seperti Royati Dareini (orang tua korban kerusuhan Mei 1998), Arief Priyadi (ortu korban kasus Semanggi I) Maria Katarina Sumarsih (orang tua korban kasus Semanggi I), dan Paian Siahaan (keluarga korban penculikan 97/98).

Anggota Wantimpres, Sudarto Danusubroto, mengatakan setuju adanya pengungkapan kasus pelanggaran HAM masa lalu. “Saya harapkan generasi ini tidak punya utang sejarah, sejarah bisa

diluruskan. Kita semua yang mengetahui bisa meluruskan,” katanya.

Di tempat terpisah, Gubernur Papua Lukas Enembe juga mendesak pengungkapan kasus pelanggaran HAM. Ada sejumlah kasus pelanggaran HAM di Papua yang terbengkalai. “Pemerintah harus jujur dan pihak yang bersalah harus jujur mengakui melakukannya,” kata Lukas.

Ia mencontohkan kasus penembakan seribu warga Biak oleh TNI dan Polri setelah dua bulan Orde Baru tumbang yang dikenal sebagai peristiwa Biak Berdarah. Laporan Elsham Papua menyebutkan ada 230 orang menjadi korban. Selain itu, peristiwa Abepura, Wamena, Wasior,

Paniai, Tolikara, dan Timika.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan total ada 16 kasus pelanggaran HAM di Papua yang akan diselidiki bersama dengan Badan Intelijen Negara, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan Komnas HAM. Kemudian, hasilnya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Luhut berjanji menyelesaikan hal ini supaya pemerintah tak terus-terusan memikul beban masa lalu. “Kami mau buka ini semua. Kalau salah, akan dihukum. Kalau memang tidak salah, jangan disebut-sebut terus,” kata dia.

● AMRIRULLAH | TIKA PRIMANDARI | ANTARA